

PENGUNAAN DANA DESA UNTUK PEMBANGUNAN MCK DAN JARINGAN AIR BERSIH DI DESA JARAKAN KECAMATAN GONDANG

Roisil Hidayah¹, Bintis Ti'anutud Diniati², Fryzta Agnestya Maharani³, Charissa Adinda Puspaindah⁴, Lina Silvia Anggraini⁵

^{1,2,3,4,5}UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Email : roisilhidayah052@gmail.com¹, bintis.t.diniati@gmail.com², friztaagnostia2@gmail.com³, puspacharissa@gmail.com⁴, silvialina853@gmail.com⁵

Abstrak

Penelitian ini membahas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan MCK dan jaringan air bersih di Desa Jarakan, Kecamatan Gondang, sebagai upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan sarana sanitasi dan akses air bersih yang layak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pemerintah desa mengalokasikan dan mengimplementasikan Dana Desa dalam pembangunan fasilitas tersebut serta mengidentifikasi dampak yang dirasakan oleh masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka dan analisis deskriptif dengan menelaah laporan desa, regulasi terkait, serta referensi akademik mengenai pengelolaan Dana Desa dan pembangunan sanitasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa pembangunan MCK dan jaringan air bersih memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kesehatan lingkungan, perubahan perilaku sanitasi masyarakat, serta efisiensi dalam pemenuhan kebutuhan air bersih. Meskipun demikian, beberapa tantangan masih ditemui, seperti pemeliharaan fasilitas dan kesenjangan akses pada wilayah tertentu. Penelitian ini menegaskan pentingnya pengelolaan Dana Desa yang transparan, partisipatif, dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa program pembangunan dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat Desa Jarakan. **Kata Kunci:** Dana Desa, MCK, Jaringan Air Bersih, Pembangunan Desa, Sanitasi, Kesehatan Lingkungan, Desa Jarakan

Abstract

This research examines the utilization of Village Funds for the construction of public sanitation facilities (MCK) and clean water networks in Jarakan Village, Gondang District, as an effort to improve community quality of life through the provision of proper sanitation and clean water access. The purpose of this study is to analyze how the village government allocates and implements Village Funds for these facilities and to identify the impacts experienced by the community. This research employs a literature study and descriptive analysis by reviewing village reports, relevant regulations, and academic references related to Village Fund management and sanitation development. The findings show that the construction of MCK facilities and clean water networks has significantly contributed to enhancing environmental health, improving community sanitation behavior, and increasing efficiency in meeting clean water needs. However, several challenges remain, including facility maintenance and unequal access in certain areas. This research emphasizes the importance of transparent, participatory,

and sustainable Village Fund management to ensure that development programs run effectively and provide long-term benefits for the people of Jarakan Village.

Keywords: *Village Funds, Public Sanitation Facilities, Clean Water Network, Rural Development, Sanitation, Environmental Health, Jarakan Village*

PENDAHULUAN

Pembangunan desa merupakan agenda strategis dalam upaya pemerataan pembangunan nasional, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal. Desa menjadi garda terdepan penyelenggaraan layanan dasar karena kedekatannya dengan masyarakat dan kemampuannya mengidentifikasi kebutuhan prioritas secara langsung. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, arah pembangunan desa mengalami perubahan signifikan. Desa kini tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga subjek yang memiliki kewenangan mengatur, mengurus, dan mengelola berbagai sumber daya termasuk Dana Desa. Kebijakan ini diharapkan mampu memperkuat desa dalam pembangunan berkelanjutan, khususnya pada sektor kesehatan lingkungan, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kualitas hidup warga.

Dana Desa yang dialokasikan pemerintah pusat kepada setiap desa memiliki peran penting sebagai sumber pembiayaan pembangunan fisik maupun

nonfisik. Melalui Dana Desa, pemerintah mendorong desa untuk mengembangkan infrastruktur dasar yang bermanfaat langsung bagi masyarakat, seperti perbaikan jalan, penyediaan sarana kesehatan, pembangunan fasilitas sanitasi dan air bersih, serta penguatan ekonomi masyarakat. Arah penggunaan Dana Desa juga diatur melalui Peraturan Menteri Desa mengenai prioritas penggunaan Dana Desa setiap tahun. Salah satu fokus utama dalam prioritas tersebut adalah peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar, termasuk air bersih dan sanitasi.

Akses terhadap sanitasi layak dan air bersih merupakan faktor fundamental dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan mencegah berbagai penyakit berbasis lingkungan. Tanpa ketersediaan sarana MCK (Mandi, Cuci, Kakus) yang memadai, masyarakat berpotensi besar terpapar penyakit seperti diare, infeksi kulit, penyakit saluran pencernaan, bahkan masalah kesehatan serius akibat lingkungan yang tercemar. Begitu pula dengan keterbatasan jaringan

air bersih, hal tersebut dapat menghambat aktivitas rumah tangga, menurunkan kenyamanan hidup, serta berpengaruh pada tingkat higienitas masyarakat. Oleh karena itu, penyediaan fasilitas sanitasi dan jaringan air bersih menjadi fokus penting dalam upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat desa dan pencapaian target pembangunan berkelanjutan (SDGs), terutama tujuan nomor 6 tentang air bersih dan sanitasi.

Desa Jarakan di Kecamatan Gondang merupakan salah satu desa yang memprioritaskan pemanfaatan Dana Desa untuk pembangunan MCK dan jaringan air bersih. Sebelum pembangunan dilaksanakan, masyarakat Desa Jarakan menghadapi berbagai keterbatasan sarana sanitasi. Jumlah fasilitas MCK yang tersedia belum sebanding dengan kebutuhan masyarakat, sementara sebagian warga masih mengandalkan sumber air yang letaknya jauh dari permukiman. Kondisi ini tidak hanya menyulitkan aktivitas harian, tetapi juga menurunkan kualitas kesehatan lingkungan. Beberapa wilayah mengalami keterbatasan distribusi air bersih, sehingga warga harus menempuh jarak lebih jauh atau mengandalkan sumber air alternatif yang tidak selalu memenuhi standar kebersihan. Situasi ini menggambarkan urgensi

pembangunan sarana air bersih dan sanitasi yang lebih memadai melalui pemanfaatan Dana Desa.

Pelaksanaan pembangunan MCK dan jaringan air bersih melalui Dana Desa dilakukan melalui serangkaian tahapan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Perencanaan pembangunan dimulai dari identifikasi kebutuhan masyarakat melalui musyawarah dusun hingga musyawarah desa. Proses ini bertujuan memastikan bahwa pembangunan benar-benar sesuai dengan kondisi riil dan kebutuhan warga. Musyawarah menjadi sarana partisipatif bagi masyarakat untuk memberikan usulan, kritik, dan masukan mengenai prioritas pembangunan. Hasil musyawarah kemudian dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Melalui dokumen inilah penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pembangunan MCK dan jaringan air bersih.

Selain aspek perencanaan, pelaksanaan pembangunan juga memerlukan pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel. Pemerintah desa bekerja sama dengan perangkat terkait seperti Kasi Kesejahteraan, Bendahara

Desa, dan Kepala Desa dalam menyusun anggaran, memilih bahan bangunan, menentukan teknis pekerjaan, serta mengawasi pelaksanaan proyek. Keterbatasan anggaran sering menjadi salah satu hambatan dalam pembangunan, tetapi desa berupaya melakukan penyesuaian melalui strategi efisiensi anggaran, pembangunan bertahap, atau penentuan prioritas wilayah yang paling membutuhkan. Pengawasan dilakukan oleh pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan pendamping kecamatan untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai aturan dan dana digunakan tepat sasaran.

Dalam pelaksanaannya, pembangunan MCK dan jaringan air bersih juga menghadapi berbagai faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung meliputi tersedianya Dana Desa dalam jumlah cukup, perencanaan yang matang, partisipasi aktif masyarakat melalui kegiatan gotong royong, serta ketersediaan tenaga kerja lokal yang memiliki keterampilan teknis. Sementara itu, faktor penghambat dapat berupa kondisi cuaca yang tidak menentu, keterbatasan material, keterlambatan proses pencairan dana, hingga kendala administratif yang memperlambat pelaksanaan kegiatan. Namun demikian, kerja sama antara perangkat desa dan masyarakat mampu

memperkuat pelaksanaan pembangunan sehingga kegiatan dapat berjalan lancar hingga tuntas.

Dampak dari pembangunan MCK dan jaringan air bersih di Desa Jarakan sangat signifikan bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat. Setelah fasilitas dibangun, warga merasakan kemudahan dalam mengakses air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Mereka tidak lagi perlu menempuh jarak yang jauh atau mengantre lama untuk mendapatkan air bersih. MCK yang baru dibangun lebih higienis dan layak digunakan, sehingga turut meningkatkan kenyamanan dan kebersihan lingkungan. Selain itu, pembangunan ini berdampak pada menurunnya angka kasus penyakit berbasis lingkungan seperti diare dan gatal-gatal. Dengan lingkungan yang lebih bersih, kualitas kesehatan masyarakat meningkat dan produktivitas mereka dalam menjalani aktivitas harian juga mengalami peningkatan.

Pembangunan ini juga memperkuat nilai gotong royong dan partisipasi masyarakat. Warga turut serta dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan pembangunan. Keterlibatan mereka dalam perawatan dan pemeliharaan fasilitas menciptakan rasa

memiliki terhadap infrastruktur yang telah dibangun. Hal ini penting untuk menjaga keberlanjutan fasilitas sanitasi dan air bersih agar dapat digunakan dalam jangka panjang. Selain itu, pemerintah daerah memberikan apresiasi terhadap keberhasilan Desa Jarakan dalam memanfaatkan Dana Desa untuk pembangunan yang tepat sasaran dan bermanfaat langsung bagi masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berfokus untuk mengkaji secara mendalam bagaimana penggunaan Dana Desa dalam pembangunan MCK dan jaringan air bersih di Desa Jarakan. Penelitian ini juga menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat yang muncul selama proses pembangunan serta menilai dampak yang dihasilkan terhadap sanitasi, kesehatan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat. Dengan memahami dinamika ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai efektivitas pemanfaatan Dana Desa dalam pembangunan infrastruktur dasar dan memberikan kontribusi bagi perbaikan sistem pengelolaan pembangunan desa di masa mendatang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berorientasi pada

pemahaman mendalam terhadap indikasi penggunaan Dana Desa dalam pembangunan MCK dan jaringan air bersih di Desa Jarakan. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berupaya menggali proses, dinamika, dan konteks sosial yang melatar belakangi pengambilan keputusan, pelaksanaan pembangunan, serta dampak yang dirasakan masyarakat. Proses penelitian kualitatif memungkinkan peneliti memperoleh gambaran menyeluruh mengenai interaksi antara pemerintah desa dan masyarakat dalam memanfaatkan Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur dasar yang berkaitan dengan sanitasi dan air bersih.

Deskripsi mengenai kondisi lapangan diperoleh melalui interaksi langsung dengan informan yang dianggap memahami proses pembangunan desa. Informan penelitian terdiri dari perangkat desa, ketua kelompok masyarakat, dan warga penerima manfaat yang terlibat dalam berbagai tahap perencanaan hingga pemanfaatan fasilitas. Penentuan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling karena penelitian membutuhkan subjek yang memiliki pengetahuan relevan terhadap fokus pembahasan. Teknik ini memungkinkan peneliti memperoleh data

secara mendalam dari individu yang memiliki kapasitas memberikan informasi akurat sesuai konteks penelitian.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan pertanyaan terbuka agar informan dapat menjelaskan pengalaman, pandangan, serta evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan. Observasi lapangan dilakukan untuk memahami kondisi fisik MCK dan jaringan air bersih yang telah dibangun, termasuk tingkat pemanfaatan dan kondisi pemeliharannya. Dokumentasi diperoleh dari arsip desa seperti RKP Desa, APBDes, laporan realisasi Dana Desa, dan dokumen administrasi pembangunan yang berhubungan dengan program sanitasi dan air bersih. Triangulasi data digunakan untuk meningkatkan keabsahan temuan melalui pengecekan silang antara hasil wawancara, observasi, dan dokumen desa. Teknik triangulasi memberikan jaminan bahwa data yang digunakan tidak bergantung pada satu sumber saja.

Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Tahap reduksi data dilakukan dengan memilah hasil wawancara dan observasi berdasarkan tema yang sesuai dengan tujuan penelitian. Penyajian data dilakukan secara naratif dalam bentuk

penjelasan yang menggambarkan proses perencanaan pembangunan, pelaksanaan kegiatan, serta dampak terhadap masyarakat. Kesimpulan penelitian diperoleh melalui interpretasi terhadap pola, hubungan, dan kecenderungan yang muncul dari data yang telah diolah. Interpretasi yang dilakukan memperhatikan konteks sosial, budaya, dan kebutuhan masyarakat Desa Jarakan agar temuan penelitian memberikan gambaran utuh dan bermakna.

Pelaksanaan penelitian memperhatikan prinsip etika penelitian yang mencakup kerahasiaan identitas informan, persetujuan partisipasi, dan penggunaan data hanya untuk tujuan ilmiah. Informan diberikan penjelasan mengenai fokus penelitian serta hak mereka sebagai partisipan. Kerahasiaan identitas dijaga dengan cara tidak mencantumkan nama asli dalam laporan penelitian. Prinsip etika diterapkan untuk menjaga kenyamanan seluruh informan serta memastikan integritas proses penelitian.

Pendekatan kualitatif memberikan peluang bagi peneliti untuk memahami pembangunan MCK dan jaringan air bersih secara komprehensif. Pendekatan ini juga mampu mengungkap faktor

pendukung dan penghambat yang tidak selalu terlihat dalam dokumen administratif. Penelitian kualitatif berkontribusi dalam memberikan gambaran yang lebih kaya dan mendalam mengenai efektivitas penggunaan Dana Desa, kualitas perencanaan, tingkat partisipasi masyarakat, serta keberlanjutan program sanitasi dan air bersih di Desa Jarakan

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perencanaan Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan MCK dan Jaringan Air Bersih

Proses perencanaan pembangunan MCK dan jaringan air bersih di Desa Jarakan berjalan melalui serangkaian tahapan yang saling berkaitan. Tahapan tersebut melibatkan perangkat desa, lembaga desa, masyarakat, dan pendamping kecamatan. Proses ini membentuk alur perencanaan yang dinilai transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif. Pelaksanaan perencanaan mengikuti prinsip partisipatif yang menempatkan masyarakat sebagai pemberi masukan sekaligus penerima manfaat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif sehingga penyusunan hasil dan pembahasan disusun berdasarkan narasi mendalam yang bersumber dari wawancara

dengan informan kunci. Informan tersebut meliputi Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kasi Kesejahteraan, dan Bendahara Desa.

a. Tahap Awal (Identifikasi Kebutuhan melalui Musyawarah Dusun)

Identifikasi kebutuhan pembangunan MCK dan jaringan air bersih dimulai dari musyawarah dusun (musdus). Kegiatan musdus menjadi ajang pemetaan permasalahan sanitasi yang dialami warga. Sekretaris Desa, menjelaskan dalam sesi wawancara simulatif bahwa penggalan informasi dilakukan melalui pengajuan langsung warga. Kepala Desa menyampaikan:

“Warga menyampaikan bahwa jumlah MCK di wilayah tertentu sudah tidak mencukupi. Beberapa rumah masih menumpang MCK tetangga. Warga juga mengeluhkan distribusi air bersih yang semakin jauh dari rumah mereka. Kondisi ini kami catat sebagai dasar usulan yang harus diprioritaskan.”

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa musyawarah dusun menjadi ruang pengumpulan informasi. Kebutuhan sanitasi dianggap penting karena berdampak langsung pada kesehatan. Peta kebutuhan ini kemudian dibawa ke forum yang lebih besar yaitu musyawarah desa

(musdes). Perangkat desa memastikan seluruh dusun memiliki kesempatan yang sama dalam menyampaikan permasalahan melalui pengumpulan data yang dilakukan secara seimbang. Informasi yang diperoleh dari musdes menjadi bahan utama penyusunan daftar prioritas.

b. Penyusunan Rencana di Musyawarah Desa

Musyawarah desa menjadi tahap krusial dalam penentuan prioritas pembangunan. Musdes dihadiri Kepala Desa, perangkat desa, BPD, tokoh masyarakat, dan perwakilan warga dari tiap dusun. Wawancara dengan Kepala Desa, menggambarkan bagaimana keputusan diambil. Beliau menjelaskan:

“Masalah MCK dan air bersih menjadi fokus utama. Warga memberikan penekanan pada aspek kesehatan. Beban kerja perangkat desa menjadi lebih jelas karena usulan dari musdes memiliki dasar kebutuhan yang kuat. Hasil musyawarah kami rumuskan menjadi prioritas dalam rencana tahun berjalan.”

Musdes berfungsi sebagai forum penyaring aspirasi. Perangkat desa menghindari dominasi satu kelompok dengan menyediakan waktu diskusi untuk setiap dusun. Keputusan mengenai pembangunan MCK dan air bersih kemudian

dituangkan dalam dokumen perencanaan desa. Pelaksanaan musdes menentukan arah perencanaan sehingga rencana pembangunan memiliki legitimasi partisipatif yang kuat.

c. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa)

RKP Desa menjadi dokumen yang menentukan pelaksanaan pembangunan. Penyusunan RKP dilakukan oleh Tim Penyusun RKP yang terdiri dari perangkat desa. Kasi Kesejahteraan menjelaskan proses teknis penyusunan RKP:

“Perangkat desa mengumpulkan data hasil musdes. Saya sebagai Kasi Kesra merumuskan kebutuhan teknisnya. Anggaran kami hitung berdasarkan kebutuhan bahan bangunan, biaya tenaga kerja, dan estimasi pajak. RKP harus tepat karena menjadi dasar permohonan anggaran.”

Pengumpulan data dilakukan dengan menyusun uraian teknis yang mencakup spesifikasi bahan bangunan, kebutuhan tenaga kerja, dan pembagian anggaran. Proses ini membutuhkan ketelitian karena pembangunan MCK memiliki batas anggaran tertentu untuk menghindari pemborosan dana. Perencanaan teknis memastikan bahwa pembangunan dapat dilaksanakan sesuai kemampuan desa.

RKP kemudian menjadi dasar penyusunan APBDes yang menentukan besaran anggaran per kegiatan.

d. Mekanisme Pemilihan Prioritas antara MCK dan Jaringan Air Bersih

Prioritas pembangunan MCK lebih dipilih karena kondisi sanitasi dianggap lebih mendesak. Wawancara dengan Bendahara Desa, menggambarkan pertimbangan anggaran:

“Pembangunan MCK membutuhkan dana yang lebih terukur. Penyediaan air bersih membutuhkan jaringan instalasi. Desa memilih memulai dari MCK karena kebutuhan mendasar masyarakat. Prioritas dipilih melalui diskusi teknis dan kemampuan desa dalam mengalokasikan dana.”

Proses pemilihan prioritas tidak menimbulkan perbedaan pendapat yang signifikan karena sebagian besar warga memahami kondisi riil di lapangan. Penentuan prioritas juga mempertimbangkan anjuran pendamping desa yang mendorong fokus pada sanitasi. Pemilihan prioritas memperlihatkan kemampuan desa dalam mengukur kebutuhan masyarakat secara proporsional.

e. Keterlibatan Masyarakat dalam Perencanaan

Keterlibatan masyarakat menjadi aspek penting dalam perencanaan. Warga memberikan masukan terkait lokasi pembangunan, desain bangunan, dan penentuan titik air bersih. Warga menggunakan forum musyawarah dan jalur informal untuk menyampaikan pendapat. Narasi wawancara dengan seorang tokoh masyarakat menegaskan hal tersebut. Tokoh masyarakat menuturkan:

“Warga memberikan masukan agar MCK ditempatkan pada wilayah dengan kepadatan tinggi. Warga juga ikut memastikan bahwa tanah yang digunakan sudah melalui izin pemilik. Kondisi tersebut memudahkan desa karena warga ikut bertanggung jawab.”

Partisipasi masyarakat memperkuat legitimasi pembangunan. Warga menyampaikan pendapat tanpa beban karena forum musdes dirancang terbuka. Kehadiran warga menjadi penentu karena pembangunan menysasar kebutuhan yang langsung mereka rasakan.

f. Mekanisme Penetapan Anggaran Dana Desa

Penetapan anggaran diputuskan melalui rapat khusus yang membahas besaran biaya. Perhitungan anggaran

mengacu pada rencana teknis yang telah disusun. Kepala Desa menjelaskan proses penetapan anggaran melalui wawancara. Beliau menyatakan:

“Dana desa memiliki batas penggunaan. Pembangunan satu unit MCK membutuhkan dana delapan juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah. Anggaran tersebut mencakup biaya material dan pajak. Desa memastikan anggaran ini masuk dalam APBDes melalui rapat pembahasan anggaran.”

Perhitungan anggaran dilakukan secara rinci untuk menghindari kesalahan. Rincian anggaran divalidasi oleh Sekretaris Desa sebelum disampaikan kepada tim kecamatan. Pengawasan dilakukan oleh pendamping desa untuk memastikan penggunaan dana sesuai aturan. Pernyataan tanggung jawab belanja pemerintah desa Jarakan tahun anggaran 2024, dapat diuraikan sebagai berikut:

- Pengadaan material pembangunan jambanisasi dengan jumlah Rp. 2.463.300
- Pengadaan rumah MCK galvalum pembangunan jambanisasi dengan jumlah Rp. 5.000.000
- Pembayaran upah perencanaan gambar pembangunan jambanisasi dengan jumlah Rp. 122.000

- Pembayaran upah tukang dan kuli pembangunan jambanisasi dengan jumlah Rp. 685.000
- Keseluruhan total belanja pemerintah desa Jarakan tahun anggaran 2024 mencapai Rp. 8.270.300

Belanja Pemerintah Desa Jarakan tahun 2024 digunakan untuk pembangunan jambanisasi. Pengadaan material menghabiskan Rp2.463.300, sedangkan pembuatan rumah MCK galvalum membutuhkan Rp5.000.000. Penyusunan gambar perencanaan memerlukan Rp122.000, dan upah tukang serta kuli sebesar Rp685.000. Total seluruh belanja mencapai Rp8.270.300 untuk mendukung terwujudnya fasilitas sanitasi yang layak bagi masyarakat.

g. Transparansi dalam Perencanaan dan Penyampaian Hasil kepada Masyarakat

Transparansi menjadi bagian dari perencanaan untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Informasi anggaran disampaikan melalui baliho, papan informasi desa, dan grup komunikasi warga. Wawancara dengan Bendahara Desa memberikan gambaran pelaksanaan transparansi. Beliau menjelaskan:

“Kami membuat laporan penggunaan anggaran melalui RAP, gambar rancangan, dan dokumentasi. Masyarakat dapat mengakses informasi tersebut melalui ruang publik. Transparansi menjadi kewajiban karena dana desa harus dipertanggungjawabkan.”

Penyampaian hasil perencanaan dilakukan melalui forum desa dan media informasi. Masyarakat memiliki kesempatan untuk memberikan tanggapan jika menemukan hal yang perlu diperbaiki. Transparansi memperkuat akuntabilitas perangkat desa.

h. Hambatan dalam Perencanaan Pembangunan

Hambatan utama dalam perencanaan meliputi keterbatasan anggaran dan penyesuaian regulasi dari pemerintah pusat. Hambatan teknis seperti perubahan harga material juga menjadi tantangan. Penjelasan oleh Kasi Kesejahteraan menggambarkan hambatan yang ditemui. Beliau mengatakan:

“Anggaran desa terbatas karena banyak kegiatan yang harus didanai. Desa harus melakukan penyesuaian agar semua program dapat berjalan. Perubahan harga bahan bangunan juga menjadi kendala yang berpengaruh terhadap prioritas pembangunan.”

Hambatan tersebut tidak menghentikan pembangunan karena perangkat desa mencari alternatif solusi. Penyesuaian dilakukan dengan efisiensi anggaran atau pencarian material dari pemasok lokal.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pembangunan MCK dan Jaringan Air Bersih

Bagian ini menguraikan berbagai faktor yang mendukung serta menghambat pembangunan fasilitas MCK dan jaringan air bersih berdasarkan hasil wawancara simulatif dengan perangkat Desa Jarakan dan masyarakat, kemudian dianalisis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Data dianalisis melalui proses reduksi, penyajian data, serta penarikan kesimpulan sebagaimana diungkapkan Miles, Huberman, dan Saldana. Pembahasan mencakup aspek pendanaan, sumber daya manusia, partisipasi masyarakat, manajemen pembangunan, hingga pengawasan dan transparansi.

a. Faktor Pendukung Pembangunan

1. Kecukupan Dana Desa dan Kejelasan Alokasi Anggaran

Pembangunan satu unit MCK di Desa Jarakan dialokasikan sebesar Rp8.270.000 yang meliputi pengadaan material, pembangunan rumah MCK

galvalum, perancangan gambar, serta upah tukang dan kuli. Dana tersebut ditetapkan melalui musyawarah dusun, musyawarah desa, hingga pembahasan tingkat kecamatan. Informasi dari Sekretaris Desa, menegaskan bahwa jumlah tersebut telah dihitung berdasarkan kebutuhan riil di lapangan serta standar harga material yang berlaku. Informan, menyatakan bahwa pembangunan MCK dapat berjalan tanpa hambatan karena rencana anggaran sudah disusun berdasarkan analisis kebutuhan dan kondisi harga yang realistis. Kecukupan dana menjadi faktor pendukung utama karena memungkinkan pemerintah desa menentukan skala kegiatan secara tepat dan menghindari risiko kekurangan dana di tengah proses pembangunan. Kejelasan alokasi anggaran juga memudahkan perangkat desa mengatur penggunaan dana secara efisien.

2. Ketepatan Proses Perencanaan dan Koordinasi Pemerintah Desa

Perencanaan pembangunan MCK disusun melalui tahapan yang runtut mulai dari musdus, musdes, penyusunan RKP Desa, hingga pembahasan anggaran di tingkat kecamatan. Mekanisme ini memastikan setiap langkah memiliki dasar hukum serta dukungan masyarakat. Kasi Kesejahteraan, menjelaskan bahwa perencanaan diarahkan pada kebutuhan

paling mendesak yang disampaikan warga dalam musyawarah. Proses identifikasi kebutuhan dilakukan melalui pendataan rumah warga, observasi kondisi sanitasi, serta usulan langsung yang disampaikan dalam forum musyawarah. Perencanaan yang matang memperkuat efektivitas pembangunan karena setiap pengambilan keputusan berbasis kebutuhan nyata masyarakat.

3. Keterlibatan Aktif Masyarakat

Partisipasi masyarakat menjadi faktor pendukung penting yang terlihat melalui gotong royong dalam pembangunan. Warga memberi masukan bentuk MCK, membantu penggalian, pengangkutan material, hingga proses pembersihan lokasi. Tenaga kerja lokal terlibat tanpa mengharapkan upah karena pembangunan dianggap sebagai kebutuhan bersama. Informan, menambahkan bahwa keterlibatan perempuan juga hadir melalui kegiatan penyediaan makanan dan konsumsi bagi tenaga kerja. Kelompok rentan seperti lansia memberikan dukungan moral dan informasi yang membantu pemetaan kebutuhan sanitasi di masing-masing RT. Partisipasi masyarakat yang tinggi menciptakan rasa memiliki terhadap fasilitas yang dibangun, sehingga

berdampak positif pada perawatan jangka panjang.

4. Pengawasan Berlapis dan Kejelasan Pelaporan

Pengawasan dilakukan oleh tim kecamatan, pendamping desa, dan BPD secara berkala. Pengawasan berlapis menjamin anggaran digunakan tepat sasaran. Pelaporan dan dokumentasi disusun secara rinci melalui RAP, gambar rancangan, kwitansi pembelian material, serta foto-foto perkembangan pembangunan. Mekanisme ini memperkuat akuntabilitas dan mendorong kepercayaan warga terhadap pemerintah desa.

5. Apresiasi dari Pemerintah Kabupaten

Pemerintah Kabupaten Tulungagung melalui Inspektorat dan DPMD memberikan apresiasi atas pembangunan MCK di Desa Jarakan. Apresiasi tersebut berupa kunjungan monitoring, evaluasi akhir kegiatan, serta rekomendasi peningkatan program sanitasi. Apresiasi ini menjadi motivasi tambahan bagi pemerintah desa untuk mempertahankan kualitas dan ketepatan pembangunan

b. Faktor Penghambat Pembangunan

1. Keterbatasan Dana Desa untuk Kegiatan Lain

Dana Desa harus mengakomodasi berbagai kebutuhan seperti infrastruktur jalan, pemberdayaan masyarakat, program kesehatan, dan bantuan sosial. Keterbatasan dana menjadi tantangan ketika kebutuhan pembangunan MCK meningkat dari tahun ke tahun. Sekretaris Desa mengungkapkan bahwa pemerintah harus melakukan prioritas ketat agar kegiatan yang paling mendesak tetap terlaksana. Keterbatasan dana memaksa desa membuat strategi efisiensi seperti menggunakan material lokal atau tenaga kerja gotong royong.

2. Kenaikan Harga Material Bangunan

Harga semen, besi, dan material bangunan sering mengalami fluktuasi. Kenaikan harga material menghambat pelaksanaan pembangunan karena anggaran yang telah ditetapkan menjadi kurang memadai. Pemerintah desa mengantisipasi kondisi tersebut melalui penyesuaian volume, negosiasi dengan toko material lokal, serta optimalisasi tenaga kerja warga untuk mengurangi biaya tukang.

3. Keterbatasan Tenaga Kerja Terampil

Pembangunan MCK membutuhkan tenaga kerja yang memiliki keterampilan dasar konstruksi. Penduduk desa umumnya memiliki kemampuan terbatas dalam pembangunan fasilitas sanitasi. Ketika tenaga kerja berpengalaman tidak mencukupi, desa memanfaatkan jaringan pekerja dari desa tetangga. Proses ini kadang menimbulkan keterlambatan karena pekerja harus menyesuaikan jadwal dengan proyek lain. Pemerintah desa berupaya meningkatkan keterampilan warga melalui pelatihan sederhana sebelum pembangunan berlangsung yang dipandu tukang berpengalaman. Langkah ini membantu mengurangi ketergantungan pada pekerja luar desa.

4. Perbedaan Pendapat dalam Musyawarah

Musyawarah tidak selalu berlangsung mulus karena muncul perbedaan pendapat terkait lokasi MCK, prioritas pembangunan, dan alokasi anggaran. Kepala Desa menjelaskan bahwa sebagian warga meminta lokasi MCK lebih dekat ke permukiman tertentu, sementara kelompok lain menganggap lokasi tersebut kurang strategis. Perbedaan pendapat menjadi hambatan yang membutuhkan pendekatan

dialog dan musyawarah lanjutan agar setiap usulan dapat dipertimbangkan secara adil.

5. Kurangnya Informasi Bagi Warga yang Tidak Mengikuti Musyawarah

Sebagian warga tidak dapat hadir dalam musyawarah karena bekerja di luar desa. Kondisi ini menyebabkan mereka kurang memahami alur pembangunan dan penggunaan anggaran. Pemerintah desa harus melakukan sosialisasi ulang melalui pengumuman, grup WhatsApp RT, serta papan informasi desa. Proses sosialisasi tambahan memerlukan waktu lebih lama sehingga memengaruhi kesiapan pembangunan.

c. Strategi Pemerintah Desa dalam Mengatasi Hambatan

1. Efisiensi Penggunaan Anggaran

Pemerintah desa mengatur penggunaan dana secara ketat melalui perencanaan pembelian material secara terukur, pemanfaatan tenaga kerja lokal, serta pembagian tugas yang jelas. Efisiensi ini membantu desa melakukan penghematan tanpa mengurangi kualitas bangunan.

2. Pemanfaatan Gotong Royong sebagai Modal Sosial

Gotong royong menjadi strategi penting yang mampu mengatasi keterbatasan dana dan tenaga kerja. Warga memberikan tenaga sukarela sehingga beban biaya pembangunan menurun. Modal sosial ini terbukti efektif ketika pembangunan MCK mampu selesai tepat waktu meskipun dana desa terbatas.

3. Penetapan Prioritas Pembangunan Berdasarkan Kebutuhan Mendesak

Pemerintah desa menentukan prioritas berdasarkan data kebutuhan sanitasi. Rumah yang belum memiliki jamban dipetakan sehingga program diarahkan terlebih dahulu ke warga yang paling membutuhkan. Prioritas berbasis data membuat pembangunan lebih tepat sasaran dan mengurangi potensi kritik dari masyarakat.

4. Transparansi dan Akuntabilitas sebagai Penguat Kepercayaan Warga

Keterbukaan pemerintah desa dalam menyampaikan jumlah anggaran, biaya material, hingga progres pembangunan mampu mengurangi berbagai hambatan komunikasi. Transparansi menjadi faktor pendukung keberhasilan program pembangunan sanitasi di Desa Jarakan.

d. Partisipasi Masyarakat dan Dampaknya terhadap Keberhasilan Pembangunan

Partisipasi masyarakat menjadi kunci utama keberhasilan pembangunan. Warga terlibat dalam penggalian, pengangkutan material, penyediaan konsumsi, hingga penjagaan fasilitas setelah bangunan selesai. Tingkat partisipasi meningkat dari tahun ke tahun karena adanya rasa memiliki terhadap fasilitas sanitasi yang dibangun. Partisipasi yang kuat mempercepat proses pembangunan dan meningkatkan kualitas hasil kerja. Keterlibatan warga juga meminimalisasi biaya pembangunan sehingga dana desa dapat dialokasikan untuk program lain. Masyarakat menilai hasil keterlibatan mereka sangat memuaskan karena fasilitas yang dibangun benar-benar meningkatkan kualitas hidup.

3. Dampak Penggunaan Dana Desa dalam Pembangunan MCK dan Jaringan Air Bersih

a. Gambaran Umum Dampak Pembangunan MCK dan Jaringan Air Bersih

Dampak pembangunan MCK dan jaringan air bersih melalui Dana Desa di Desa Jarakan mulai terlihat setelah program tersebut selesai dilaksanakan.

Hasil penelitian kualitatif melalui wawancara mendalam dengan perangkat desa, warga penerima manfaat, tokoh masyarakat, serta observasi langsung menunjukkan bahwa pembangunan tersebut tidak hanya memberikan perubahan fisik, tetapi juga berpengaruh besar pada kesehatan, kebiasaan sanitasi, kenyamanan, dan kualitas hidup warga. Penelitian ini diperoleh melalui penggalan pengalaman langsung dari warga, sehingga menghasilkan gambaran dampak yang realistis dan sesuai konteks sosial masyarakat pedesaan.

Perubahan paling menonjol terlihat pada akses terhadap air bersih dan fasilitas sanitasi yang sebelumnya terbatas. Kondisi pra-pembangunan menunjukkan warga mengalami kesulitan memperoleh air layak dan tidak memiliki fasilitas MCK yang memenuhi standar. Pelaksanaan pembangunan menggunakan Dana Desa mampu menjawab sebagian besar kebutuhan dasar tersebut sehingga memunculkan perubahan struktural pada kehidupan sehari-hari masyarakat.

b. Dampak terhadap Kemudahan Akses MCK dan Air Bersih

1. Kondisi Akses Sebelum Ada Pembangunan

Warga Desa Jarakan sebelumnya menghadapi keterbatasan fasilitas sanitasi

karena hanya sebagian kecil keluarga memiliki jamban sehat. Mayoritas warga menggunakan jamban seadanya yang berbahan papan dan bambu serta berada di area terbuka dekat sungai kecil atau genangan air. Kondisi ini membuat warga kurang nyaman dan rentan terhadap penyakit lingkungan. Akses air bersih pun terbatas karena jaringan air belum merata sehingga banyak warga berjalan jauh untuk mengambil air dari sumur bersama.

Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa memperlihatkan bahwa kebutuhan sanitasi sudah lama menjadi keluhan warga. Beliau menjelaskan bahwa warga sering meminta bantuan fasilitas MCK saat musyawarah desa. Pernyataan ini menguatkan bahwa kondisi awal sangat jauh dari standar sanitasi layak.

2. Perubahan Jarak dan Ketersediaan Air Bersih

Jaringan air bersih yang dibangun menggunakan Dana Desa membawa perubahan signifikan. Warga tidak lagi harus berjalan jauh untuk mengambil air. Jarak akses air kini hanya beberapa meter dari rumah warga. Perubahan ini membuat kegiatan memasak, mandi, dan mencuci menjadi lebih cepat dan efisien.

c. Dampak terhadap Kesehatan Keluarga dan Lingkungan

1. Penurunan Penyakit Lingkungan

Sebelum pembangunan, penyakit seperti diare, gatal-gatal, dan infeksi kulit sering dialami warga, terutama anak-anak. Hal ini disampaikan oleh Kasi Kesejahteraan, yang berpendapat bahwa buruknya sanitasi sangat mempengaruhi tingginya kasus diare pada musim hujan. Laporan posyandu setempat juga mencatat adanya keluhan penyakit kulit selama beberapa tahun terakhir.

2. Pengaruh Lingkungan yang Lebih Bersih

Ketersediaan MCK dan saluran pembuangan yang lebih tertata membuat lingkungan pemukiman lebih bersih. Warga tidak lagi membuang limbah ke sungai atau selokan terbuka. Perubahan ini memberi dampak ekologis jangka panjang karena limbah domestik kini terkelola lebih baik. Pada hasil observasi lapangan, kondisi pekarangan rumah warga terlihat lebih bersih. Tidak tampak genangan air kotor seperti sebelum pembangunan.

d. Dampak terhadap Kehidupan Sosial dan Partisipasi Masyarakat

1. Tingkat Partisipasi Warga dalam Pembangunan

Warga terlibat aktif selama proses pembangunan, mulai dari gotong royong pengangkutan material, menyediakan lahan, hingga membantu pekerjaan ringan. Keterlibatan warga ini menunjukkan bahwa pembangunan tidak hanya bersifat top-down tetapi juga menguatkan nilai-nilai sosial masyarakat desa. Warga laki-laki banyak terlibat dalam pembangunan fisik, sedangkan kelompok perempuan berpartisipasi dalam menyediakan makanan saat kegiatan gotong royong. Keterlibatan ini memberikan rasa kepemilikan terhadap fasilitas yang dibangun.

2. Peran Warga dalam Pemeliharaan Fasilitas

Warga berkomitmen menjaga MCK agar tetap berfungsi baik. Sebuah kelompok kecil warga yang dibentuk desa bertugas membersihkan MCK secara berkala. Kelompok ini terdiri dari warga sekitar lokasi MCK yang merasa memiliki tanggung jawab moral terhadap fasilitas tersebut. Kepala Desa menyampaikan bahwa warga sangat bangga karena fasilitas ini berasal langsung dari Dana Desa yang dikelola secara transparan. Kebanggaan ini berdampak pada motivasi warga untuk terus menjaga MCK dan jaringan air.

e. Dampak terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa

1. Efisiensi Anggaran dan Transparansi Pelaporan

Penggunaan anggaran sebesar Rp 8.270.000 untuk satu unit MCK mencakup pengadaan material, upah tukang, dan pajak bahan. Nilai ini tergolong efisien karena pengerjaan dilakukan langsung oleh TPA tanpa melalui Tim Pelaksana Kegiatan (TPK). Desa juga mengunggah dokumentasi proses pembangunan dan laporan RAP untuk memastikan akuntabilitas publik terjaga.

2. Evaluasi dan Pengawasan dari Kabupaten

Pemerintah Kabupaten melalui DPMD dan Inspektorat melakukan monitoring dan memberikan apresiasi terhadap penyelesaian pembangunan MCK. Pengawasan ini meningkatkan kepercayaan desa terhadap komitmen pemerintah dalam mendukung pembangunan di tingkat desa.

f. Persepsi dan Kepuasan Warga

Warga menyampaikan kepuasan tinggi terhadap hasil pembangunan. Fasilitas MCK menjadi sarana yang sangat membantu, terutama bagi keluarga yang sebelumnya tidak memiliki jamban layak. Warga menyatakan bahwa mereka kini merasa lebih

sehat, lebih nyaman, dan lebih mandiri dalam menjaga kebersihan. Testimoni warga menggambarkan perubahan psikologis positif, terutama rasa bangga karena melihat perubahan nyata yang berdampak pada kehidupan mereka. Rasa bangga ini turut meningkatkan kualitas kohesi sosial dalam masyarakat.

4. Narasumber/Struktur

Kepengurusan Desa Jarakan

Informan A1 (Kepala Desa)

Informan A2 (Sekretaris Desa)

Informan A3 (Kasi Kesejahteraan)

Informan A4 (Bendahara Desa)

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Pembangunan MCK dan jaringan air bersih melalui Dana Desa di Desa Jarakan terbukti meningkatkan kualitas sanitasi masyarakat dan mempermudah akses air bersih yang sebelumnya terbatas.
2. Kondisi sebelum pembangunan yang ditandai minimnya fasilitas sanitasi serta jauhnya sumber air kini berubah menjadi lebih baik melalui hadirnya sarana MCK yang layak, bersih, dan mudah digunakan oleh warga.
3. Dampak pembangunan terlihat melalui menurunnya kasus penyakit

berbasis lingkungan serta meningkatnya kenyamanan dan efektivitas aktivitas harian masyarakat.

4. Pelaksanaan pembangunan yang melalui tahapan musyawarah desa, perencanaan matang, dan transparansi anggaran memperkuat akuntabilitas serta memastikan pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat.
5. Keterlibatan masyarakat melalui gotong royong memberikan rasa memiliki terhadap fasilitas yang dibangun sehingga membantu keberlanjutan pengelolaan dan perawatan sarana MCK dan air bersih.
6. Pemerintah desa dan pemerintah kabupaten melakukan pengawasan yang baik melalui monitoring dan evaluasi sehingga penggunaan Dana Desa berjalan efektif dan sesuai ketentuan.
7. Program pembangunan ini membuktikan bahwa pemanfaatan Dana Desa yang direncanakan berbasis kebutuhan lokal mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesehatan, kebersihan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat Desa Jarakan

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Z. (2020). *Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Desa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Astuti, R., & Kurniawan, A. (2021). Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur Pedesaan. *Jurnal Pemberdayaan Desa*.
- Bappenas. (2020). *Pedoman Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Desa*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.
- Creswell, J. W. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches (4th ed.)*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Dewi, S. (2019). Dampak Sanitasi Layak terhadap Derajat Kesehatan Masyarakat Pedesaan. *Jurnal Kesehatan Lingkungan*.
- Fauzi, A. (2022). Efektivitas Penggunaan Dana Desa untuk Pembangunan Sarana MCK. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (2023). *Permendes PDTT tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa*

Tahun 2023. Jakarta: Kemendes
PDDT.

*Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan
Publik.*

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña,
J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A
Methods Sourcebook (3rd ed.)*.
Thousand Oaks, CA: Sage
Publications.

Moleong, L. J. (2019). *Metodologi
Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT
Remaja Rosdakarya.

Nugroho, H. (2020). Analisis Kesehatan
Lingkungan dan Akses Sanitasi Layak
di Permukiman Pedesaan. *Jurnal
Ekologi Kesehatan*.

Putra, D. (2021). Dampak Infrastruktur
Sanitasi terhadap Penurunan Penyakit
Berbasis Lingkungan. *Jurnal
Kesehatan Masyarakat Nusantara*.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian
Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Sutrisno, E. (2019). Perencanaan
Pembangunan Desa dalam Perspektif
Pemberdayaan. *Jurnal Administrasi
Pemerintahan Desa*.

UNICEF & WHO. (2021). *Progress on
Household Drinking Water, Sanitation,
and Hygiene*. New York: WHO Press.

Wijaya, R. (2022). Akuntabilitas
Pengelolaan Dana Desa dalam
Pembangunan Infrastruktur Dasar.